

1. PEMILIHAN UMUM - INDONESIA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. INDONESIA - POLITIK DAN PEMERINTAHAN

B

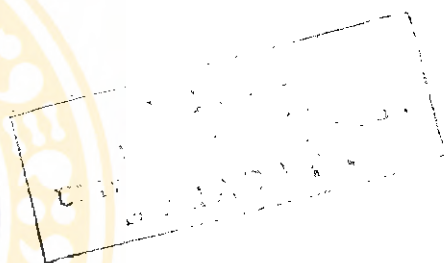
BASIS LEGITIMASI KEKUASAAN ORDE BARU

**(STUDI DESKRIPTIF MENGENAI PEMANFAATAN PEMILU 1971-1997
SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PENGUKUH
LEGITIMASI POLITIK ORDE BARU)**

SKRIPSI



KK
Fig-P 33/99
Tn
b



OLEH :

DIDI TRISONGKO

NPM : 079414250

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

Semester Genap Tahun 1998 / 1999

LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN

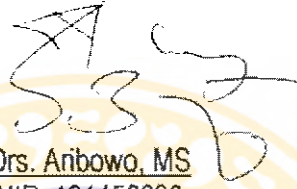
Skripsi ini disetujui untuk diuji



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP
TAHUN AJARAN 1998/1999**

Skripsi ini telah dipresentasikan/dipertahankan dihadapan para panitia penguji
pada tanggal 16 Juli 1999,

**Ketua:
Pembimbing/Penguji Skripsi 1**



Drs. Anibowo, MS
NIP. 131453806

**Para Anggota:
Penguji Skripsi 2**



Dra. Siti Aminah, MA
NIP. 131836624

Penguji Skripsi 3



Drs. Kris Nugroho, MA
NIP. 131801408

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menggarisbawahi kembali, pertama, urgensi peninjauan kembali format pemilihan umum, sistem kepartaian, dan format politik Orde Baru pada umumnya, sehingga pemilihan umum bisa menjadi lembaga demokratis yang memungkinkan rakyat berdaulat. Kedua, dalam konteks struktur dan proses pemilihan umum, peninjauan kembali itu berkaitan dengan pembatasan keterlibatan pemerintah dalam semua tahap pemilihan umum di satu pihak, dan peningkatan keterlibatan serta partisipasi masyarakat, termasuk OPP, di lain pihak. Sebab harus diakui, penyimpangan terbesar pemilihan-pemilihan umum yang diadakan di bawah Orde Baru bersumber pada dominasi pemerintah yang amat berlebihan di dalam struktur maupun proses pemilihan umum. Ketiga, fungsi-fungsi pemilihan umum harus terus diperluas agar tidak sekedar sarana legitimasi politik bagi pemerintah, terlebih bilamana legitimasi politik yang dicapai itu baru bersifat formal-prosedural. Terlalu besar biaya sosial, politik, dan ekonomi yang dikeluarkan jika fungsi pemilihan umum hanya untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah. Keempat, penundaan perbaikan dan/atau perubahan format pemilihan umum berikut sistem politik yang mendasarinya tentulah akan terus memperbesar biaya sosial, politik, dan ekonomi yang akan ditanggung bangsa Indonesia di masa depan. Gejala kekerasan politik, pergesekan massa pendukung OPP, dan kerusuhan yang marak bisa jadi adalah sebagian "uang muka" dari biaya yang harus ditanggung itu.

Penggalan data dalam penelitian ini dilakukan melalui riset perpustakaan (*library research*). Dari data yang diperoleh itu kemudian diseleksi dan dianalisis secara deskriptif historis kualitatif.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, menghasilkan kesimpulan bahwa problematik mendasar pemilu-pemilu Orde Baru berkaitan dengan terlalu kuatnya dominasi dan intervensi pemerintah—yang antara lain dalam kerangka mempertahankan sistem kepartaian hegemonis yang memandulkan sistem kepartaian sepanjang kekuasaan Orde Baru—baik dalam struktur maupun proses pemilu. Yaitu secara garis besarnya, dengan menciptakan restrukturisasi kehidupan politik (sistem dan format pemilu) yang sangat cenderung memarginalisasikan keterlibatan (kontrol) rakyat di satu pihak, dan menomorsatukan peran pemerintah secara berlebihan di lain pihak.

Keywords:

Legitimasi Politik Orde Baru
Restrukturisasi Politik
Dominasi Negara Orde Baru